

# Inpres Moratorium Penebangan dan Masa Depan Kehutanan Indonesia

**DRADJAD H. WIBOWO**  
PhD (U.Qld), MEc. (U.Qld), Ir (IPB)

**SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
INDONESIA (SDI),**  
Jl. Rasamala No. 68A, Bogor  
Telp. 0251-7104521,  
Fax. 0251-8630478,  
HP. 0818942324  
E-mail: [dhwibowo@indo.net.id](mailto:dhwibowo@indo.net.id)

Disampaikan dalam acara peresmian  
gedung Fakultas Kehutanan UGM,  
Jogyakarta 7 Maret 2011

## Draft Inpres Moratorium

- Sbgmn diketahui saat ini draft Inpres moratorium penebangan sedang dibahas secara intensif di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
- Satgas REDD+ mengajukan usulan draft yang oleh dunia usaha dipandang “anti-bisnis, anti economic growth”.
- Di sisi lain, Satgas REDD+ dan para LSM pendukungnya (apa ditambah Norwegia ?) beranggapan “tidak bisa lagi business as usual” dlm perijinan dan pengelolaan hutan.
- Draft versi Kantor Menko yang bdsk pembahasan dng Kemhut, Kemneg LH dan BPN dipandang oleh LSM (oleh Satgas juga??) sbg “business as usual”, “pro-bisnis”.

# Draft Inpres Moratorium

- **Contohnya ttg perijinan pemanfaatan hutan.**
- **Usulan Satgas adalah seluruh hutan dan lahan gambut ditunda pemberian izinnya, kecuali:**
  - a) **perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan (tambang)**
  - b) **permohonan izin baru yang telah memperoleh persetujuan prinsip (SP1) dari Menhut**
  - c) **IUPHHK-HA pada hutan sekunder yang tidak bergambut & IUPHHK-HTI pada hutan sekunder yang rusak dan lahan kritis**
  - d) **Kepentingan pembangunan Nasional yang bersifat vital**

# Draft Inpres Moratorium

- Sementara draft dari Kantor Menko adalah Penundaan izin yang berdampak pada konversi hutan alam primer dan lahan gambut (HTI, tambang, HPH, dan kebun) kecuali:
  - a) Perpanjangan Izin Penggunaan Konversi Hutan
  - b) Yang telah memperoleh izin prinsip konversi hutan
  - c) IUPHHK-HA pada hutan sekunder yang tidak bergambut & IUPHHK-HTI pada hutan sekunder yang rusak dan lahan kritis
- Selain itu masih ada unresolved matters yang krusial, terkait dng: (i) kewenangan Satgas, (ii) HGU, (iii) perpanjangan Inpres moratorium

## Draft Inpres Moratorium

- **Satgas meminta Peta Indikatif Moratorium (PIM) berlaku untuk seluruh areal bergambut sesuai Kepres No. 32/1990 (Poin 1).**
- **Penyusunan pedoman teknis perizinan, kriteria hutan rusak dan kritis, serta pedoman tata kelola hutan dan lahan gambut dimintakan menjadi wewenang Satgas (Poin 2).**
- **Satgas meminta kewenangan untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan Inpres (Poin 3).**
- **Satgas juga mengusulkan agar BPN melakukan penundaan terhadap sertifikat HGU pada hutan dan lahan gambut (Poin 4).**

## Draft Inpres Moratorium: pro-cons

- Kritik dari pendukung Satgas thd draft Kantor Menko antara lain:

(i) frasa “yang berdampak konversi” berarti pengubahan hutan alam menjadi HTI monokultur dapat berjalan terus, krn pengubahan ini tidak tergolong konversi dalam definisi Kemhut.

(ii) tidak adanya kewenangan Satgas dalam perijinan dan tata kelola hutan akan membuat moratorium tidak optimal dan tidak berdampak signifikan.

(iii) kata “dan” dalam frasa “hutan alam primer dan lahan gambut” secara legal bisa ditafsirkan sebagai hutan alam primer di lahan gambut. Jadi cakupan moratorium terlalu sempit.

## Draft Inpres Moratorium: pro-cons

- Pendukung Satgas berpandangan draft moratorium dari Satgas tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, tidak anti-bisnis.
- Alasannya, areal yang bisa ditanami masih banyak, tanpa harus menebang hutan. Di Kalimantan, kata mereka, masih ada 6 juta hektar lahan kritis. Di dalamnya terdapat 2.3 juta ha ijin sawit di mana 1.1 juta hektar-nya sudah HGU. Di Sumatera terdapat 4.5 juta ha lahan kritis dengan ijin kebun sawit dan HTI yang tidak ditanami.
- Kesimpulan pendukung satgas, ekspansi perkebunan sawit dan HTI tetap bisa berlangsung tanpa harus menebang satu pohon pun dari hutan primer maupun sekunder. Jika ada usaha sawit atau HTI yang perlu menebang, itu karena mereka melikuidasi hutan untuk memodali kebun atau HTI-nya.

## Draft Inpres Moratorium: kewenangan

- Hemat saya, terdapat persoalan ketatanegaraan yang serius jika kewenangan Satgas poin 1-4 (Slide #5) disetujui.
- Poin 1 dan 2 mengambil alih kewenangan Kemhut. Poin 4 mengambil kewenangan BPN. Poin 3 mengambil kewenangan kantor Menko Perekonomian.
- Perdebatan akhir2 ini ttg “Satgas ad hoc vs lembaga resmi”
- Persoalan yang terjadi antara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan lembaga resmi seperti Polri, Kejagung, Kemkumham bisa muncul kembali.
- Berpotensi memicu polemik politik dan ketatanegaraan yang tidak perlu dan kontraproduktif.



## Draft Inpres Moratorium: kewenangan

- Secara ketatanegaraan, sangat tidak sehat kalau kewenangan eksekusi kebijakan ada di tangan tim ad hoc, bukan Kementerian/Lembaga.
- Jika diberi kewenangan eksekutif, tim atau lembaga ad hoc sebaiknya bekerja di bawah K/L tertentu
- Sebagai contoh adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dasar hukum pembentukannya lebih tinggi dari Inpres, krn keberadaannya ditetapkan dalam UU BI dan pembentukannya melalui sebuah PP.
- BPPN diberi kewenangan eksekusi, tapi dia bekerja di bawah Meneg BUMN, dalam koordinasi KKSK yang dipimpin Menko Perekonomian.

## Draft Inpres Moratorium: kewenangan

- Menteri teknis, dalam hal ini Menneq BUMN, bisa “memberhentikan” Kepala BPPN.
- Satgas mempunyai setting yang berbeda, sebagai tim ad hoc yang bertanggung jawab kepada Presiden langsung. Jika diberi kewenangan eksekutif, akan terjadi tumpang tindih dan benturan kewenangan dengan K/L terkait.
- Krn itu perlu dirumuskan kewenangan yang tepat untuk sebuah tim adhoc, seperti misalnya monitoring dan evaluasi.
- Jika diberi kewenangan eksekusi seperti KPK, dasar hukumnya sebaiknya berupa Undang-Undang.
- Idealnya, penguatan K/L lebih kitautamakan drpd tim adhoc

## Draft Inpres Moratorium: judicial review

- Perumusan mengenai kewenangan lembaga, serta definisi dan cakupan moratorium, perlu dilakukan dengan sangat teliti, karena rawan terkena judicial review di MK dan atau MA.
- Khususnya terkait dengan pasal 33 dalam UUD 45. Frasa “dikuasai negara” dan “digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” perlu dipahami benar.
- Moratorium ijin pemanfaatan hutan tertentu bisa di-uji materi bertentangan dengan frasa di atas. Masalah kewenangan tim adhoc juga bisa diuji materi terhadap UU Kehutanan.
- Karena itu, empat pilar pembangunan perlu menjadi rujukan utama, yaitu: (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, (3) Stabilitas dan (4) Sustainabilitas. Sustainabilitas ini meliputi: (i) lestari ekonomi , (ii) lestari sosial dan (iii) lestari ekologi.

## Draft Inpres Moratorium: lahan

- Selain untuk areal perkebunan dan HTI, kebutuhan lahan juga sangat mendesak untuk hal-hal seperti: (1) kebutuhan pangan, (2) kebutuhan energi, (3) pembangunan fasilitas pemerintahan dan publik.
- Gejolak harga minyak krn krisis Arab, dan kecenderungan kelangkaan supply pangan global mau tidak mau meningkatkan demand thd konversi hutan.
- Ini antara lain untuk pencetakan sawah baru, tambang batu bara. Belum lagi kebutuhan pembangunan jalan, gedung2 daerah pemekaran dst.
- Fakta di berbagai kota/kabupaten sekarang sangat sulit mendapatkan lahan utk kebutuhan di atas. Bahkan luas di atas kertas beda jauh dng realisasi. Contoh Labusel

## Draft Inpres Moratorium: lahan

- Kita sering mendengar, kawasan hutan primer tapi tidak ada hutannya. Bahkan tidak sedikit kota dan kecamatan yang sebagian atau seluruhnya berada dalam kawasan hutan. Misalnya di Batam, Ngada di NTT, Kota Pinang dst dsb.
- Karena itu perlu re-assessment nasional terhadap kebutuhan dan ketersediaan lahan, yang dirinci per kabupaten dan kota. Data “areal berijin sawit atau HTI tapi tidak ditanami” perlu diinvestigasi secara teliti sehingga pemegang ijin yang serius menanam sawit atau HTI tidak menjadi korban generalisasi. Implementasi tata ruang yang terkait kawasan hutan juga perlu dinilai ulang dan dirapikan.
- Jika tidak, kondisi lapangan di atas bisa menimbulkan benturan kebijakan yang serius jika kita tidak hati-hati dalam merumuskan definisi dan cakupan moratorium.

## Forestry in the Future: 3T

- Hemat saya, jauh lebih produktif mendorong 3T (tanam, tanam dan tanam) daripada moratorium.
- Sejak lama kita tahu masa depan kehutanan Indonesia ada pada hutan tanaman, bukan lagi hutan alam. Hutan tanaman itu bisa HTI maupun HTR. Tanamannya bukan hanya akasia. Saat ini sudah mulai muncul minat investasi untuk hutan tanaman karet.
- Bukan tidak mungkin jika rasio harganya menguntungkan, akan muncul Hutan Tanaman Energi sbg sumber bioenergi.
- Karena itu pengembangan hutan tanaman dan atau agroforestry perlu didorong pemerintah. Ilmu agronomi, hama penyakit tanaman dll tampaknya perlu lebih intensif diajarkan di Fakultas Kehutanan.

# Moratorium dan Lol Norwegia: tinjauan kritis

- Untuk mengetahui mengapa moratorium , yang terutama dipicu oleh Lol dengan Norwegia, *bukan the best available strategy for Indonesian forestry and livelihood*, pada slides berikut disajikan data dan analisis kritis terhadap konsep moratorium itu.
- Ketimpangan global semakin menimbulkan tanda tanya mengapa negara-negara maju mendorong moratorium di negara sedang berkembang, sementara mereka tidak mengubah gaya hidup yang “boros karbon” atau “konsumtif karbon”.

**Ketimpangan global sangat obvious. Cerminan dari ketimpangan kesejahteraan dan ketidakadilan global.**

**Table: Electricity Net Consumption ('000 kilowatthours per capita).**

**Sumber: diolah dari US Energy Information Administration**

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>North America</b>	10.29	10.46	10.36	10.52
<b>Central &amp; South America</b>	1.65	1.69	1.76	1.82
<b>Europe</b>	5.39	5.46	5.59	5.63
<b>Eurasia</b>	3.91	4.00	4.19	4.30
<b>Middle East</b>	2.68	2.80	2.92	3.03
<b>Africa</b>	0.50	0.52	0.52	0.54
<b>Asia &amp; Oceania</b>	1.32	1.40	1.51	1.61
<b>World</b>	2.36	2.43	2.51	2.59



Konsumsi listrik per kapita Indonesia sangat rendah, on par dengan China. Refleksi dari pendapatan per kapita, kesejahteraan ekonomi per kapita.

Table: Electricity Net Consumption ('000 kilowatthours per capita).

Sumber: diolah dari US Energy Information Administration

	2004	2005	2006	2007
United States	12.69	12.89	12.79	13.02
Brazil	1.87	1.92	1.98	2.08
Norway	23.88	24.68	23.95	24.73
China	1.51	1.68	1.92	2.14
India	0.43	0.44	0.47	0.51
Indonesia	0.44	0.46	0.48	0.51
Japan	7.52	7.65	7.70	7.90
Malaysia	3.19	3.29	3.93	4.00
Singapore	7.45	7.68	7.82	8.04
Thailand	1.75	1.83	1.92	1.99
World	2.36	2.43	2.51	2.59

**Emisi CO2 di Amerika Utara dan Eropa yang berasal dari fossil fuel (non-renewable source of energy) berkali-kali lipat Afrika dan Asia & Oceania.**

**Table: CO2 Emissions from the Consumption of Petroleum (metric tons/capita)**

**Sumber: diolah dari US Energy Information Administration**

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>North America</b>	7.34	7.36	7.17	7.11	6.69
<b>Central &amp; South America</b>	1.66	1.69	1.74	1.78	1.81
<b>Europe</b>	3.78	3.79	3.83	3.75	3.73
<b>Eurasia</b>	1.98	2.03	2.00	2.00	2.04
<b>Middle East</b>	4.31	4.38	4.40	4.55	4.72
<b>Africa</b>	0.46	0.47	0.46	0.47	0.47
<b>Asia &amp; Oceania</b>	0.85	0.86	0.86	0.87	0.86
<b>World</b>	1.71	1.72	1.71	1.70	1.68

Emisi CO2 dari konsumsi fossil fuel di Indonesia, China, India jauh lebih rendah dari US, Norway, Singapore. Jadi siapa yang lebih merusak dalam pemanasan global?

**Table: CO2 Emissions from the Consumption of Petroleum (metric tons/capita)**

Sumber: diolah dari US Energy Information Administration

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>United States</b>	8.90	8.88	8.70	8.59	8.01
<b>Brazil</b>	1.48	1.52	1.57	1.60	1.67
<b>Norway</b>	5.91	5.90	6.38	6.30	6.09
<b>China</b>	0.65	0.68	0.71	0.73	0.75
<b>India</b>	0.28	0.29	0.32	0.33	0.34
<b>Indonesia</b>	0.77	0.80	0.76	0.74	0.74
<b>Japan</b>	5.05	5.06	4.88	4.73	4.50
<b>Malaysia</b>	2.95	3.00	2.95	2.93	2.86
<b>Singapore</b>	26.05	27.31	28.30	30.55	31.08
<b>Thailand</b>	2.01	2.13	1.97	1.94	1.90
<b>World</b>	1.71	1.72	1.71	1.70	1.68 <sup>19</sup>

Emisi CO2 dari konsumsi energi sangat timpang antara Afrika, Asia & Oc, C&S America vs North America, Europe dan Middle East. Ekonomi Makro/Mikro:  $C = f(Y)$ .

Table: CO2 Emissions from Energy Consumption (metric tons/capita)

Sumber: diolah dari US Energy Information Administration

	2004	2005	2006	2007	2008
North America	16.19	16.19	15.83	15.91	15.32
Central & South America	2.40	2.47	2.52	2.58	2.66
Europe	7.96	7.93	8.02	7.95	7.84
Eurasia	8.71	8.79	8.97	8.98	9.35
Middle East	7.29	7.77	7.89	8.07	8.43
Africa	1.16	1.17	1.15	1.16	1.15
Asia & Oceania	2.81	2.94	3.04	3.17	3.27
World	4.32	4.41	4.44	4.52	4.54

**Emisi CO2 dari konsumsi energi di Indonesia sangat rendah dibandingkan US, Norway, Singapura bahkan Malaysia. Jadi siapa yang lebih memanaskan bumi?**

**Table: CO2 Emissions from Energy Consumption (metric tons/capita)**

**Sumber: diolah dari US Energy Information Administration**

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>United States</b>	20.37	20.26	19.80	19.93	19.18
<b>Brazil</b>	1.91	1.96	2.00	2.05	2.18
<b>Norway</b>	10.52	9.16	8.75	9.13	8.70
<b>China</b>	3.95	4.26	4.46	4.73	4.91
<b>India</b>	1.05	1.09	1.16	1.23	1.31
<b>Indonesia</b>	1.37	1.45	1.56	1.71	1.83
<b>Japan</b>	9.89	9.77	9.76	9.91	9.54
<b>Malaysia</b>	6.40	6.36	6.33	6.33	6.42
<b>Singapore</b>	29.03	30.24	31.19	33.86	34.61
<b>Thailand</b>	3.54	3.77	3.67	3.81	3.88
<b>World</b>	4.32	4.41	4.44	4.52	4.54

## PDB Norwegia. Sumber: statistics norway

	1970	1980	1990	2000	2006	2008*
Gross domestic product <sup>1</sup>	90 929	314 698	736 294	1 481 241	2 159 573	2 548 322
Agriculture, hunting and forestry	3 521	9 075	17 957	15 679	14 127	17 882
Fishing and fish farming	1 148	2 464	4 392	11 634	14 761	9 796
Oil and gas extraction		042 173	87 597	325 659	529 493	665 390
Extraction of oil and gas		040 610	85 727	319 651	511 322	632 677
Service activities incident to extraction		01 563	1 870	6 008	18 171	32 713
Mining and quarrying	590	1 030	1 730	2 575	3 916	5 495
Manufacturing	16 621	43 961	80 137	138 231	191 817	217 675
Food products, beverages, tobacco	2 511	5 695	11 771	22 794	32 800	35 318
Textiles, wearing apparel, leather	1 131	1 717	1 753	2 169	2 714	2 130
Wood and wood products	1 037	3 193	4 165	5 518	8 075	8 882
Pulp, paper and paper products	978	1 972	4 561	6 377	4 812	3 597
Publishing, printing, reproduction	1 142	3 245	9 061	14 588	17 282	16 588
Refined petroleum, chemical and mineral products	1 710	4 443	8 624	14 532	21 359	20 720
Basic chemicals	665	2 294	4 715	6 627	8 975	14 049
Basic metals	1 562	4 791	6 389	12 852	15 294	11 992
Machinery and other transport equipment	3 971	10 988	19 829	33 886	50 937	66 831
Building of ships, oil platforms and modules	1 177	3 924	6 671	13 585	22 748	31 262
Furniture and other manufacturing n.e.c.	737	1 699	2 598	5 303	6 821	6 306

## Sekilas Ekonomi Norwegia

- Pada tahun 2008 PDB Norwegia sebesar 2,548,322 Juta NOK (2008 → US\$ = 7 NOK). Atau sekitar US\$ 364 billions.
- Pada tahun 2008 sekitar 26.11% dari PDB Norway berasal dari sektor “Oil and Gas Extraction”, yang terdiri dari ekstraksi minyak dan gas serta jasa-jasa terkait dengan ekstraksi minyak dan gas. Pada tahun 1970 peranan sektor ini 0%, naik menjadi 13.4% (1980). Dalam 28 tahun peranan sektor migas thd PDB Norway naik hampir 2 kali lipat.
- Petroleum menyumbang 1/5 penerimaan APBN Norway. Ini sumbangan langsung. Belum multipliernya. Pajak dan Cukai menyumbang 60%.
- Jadi Norway menikmati kesejahteraan dan kekayaan luar biasa dari fossil fuel yang banyak menyumbang emisi CO<sub>2</sub>. Nilai tambah sektor fossil fuel ini = US\$ 20 464/penduduk

## Sektor yang terpengaruh di Indonesia

- Untuk Indonesia, nilai tambah sektor kehutanan pada 2009 (harga berlaku) adalah Rp 44.95 triliun atau 0.8% PDB.
- Jika ditambah industri kayu (Rp 80.13 triliun), nilai tambahnya adalah Rp 125.08 triliun, atau 2.23% PDB. Jika ditambah lagi dengan industri kertas (Rp 61.11 triliun), nilai tambah ketiganya Rp 186.19 triliun, atau 3.32% PDB.
- Nilai tambah sektor perkebunan Rp 112.5 triliun (2% PDB). PDB 2009 = Rp 5613.44 triliun.
- Jumlah tenaga kerja masih agak simpang siur, tapi mari kita coba hitung secara kasar.



## Sektor yang terpengaruh di Indonesia

- Sawit: areal 2009 = 7.3 juta hektar, prod 21.5 juta ton CPO.
- Sekitar 39% dari 7 juta hektar sawit adalah perkebunan milik rakyat. Rasio kebutuhan tenaga kerja sawit sekitar 35 orang per 100 hektar (*“Pembangunan ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit” Teguh Wahyono dan Dja’far, Jurnal Pusat Penelitian Kelapa Sawit Vol 12 No 3 tahun 2004*).
- Estimasi jumlah tenaga kerja di kebun lebih kurang 2.45 juta. Ini estimasi bawah karena untuk kebun rakyat, umumnya terjadi over-employment. Jika rasio 1:2 dipakai, untuk kebun rakyat terdapat setidaknya 1.5 juta tenaga kerja. Jumlahnya  $(1.5 + 1.4) = 2.9$  juta atau +/- 3 juta (estimasi lain 4.5 jt)

## Ironi Karbon Global

- Jika dihitung per pekerja (antara 3-4.5 juta) maka, dengan nilai Rp 6.24 juta/ton CPO, jika diasumsikan nilai tambah 50%, maka nilai tambah sektor Sawit diperkirakan Rp 67.08 triliun. Artinya sekitar US\$ 1660-2480/pekerja.
- Tapi jika dihitung per populasi seperti di Norway, maka nilai tambah per penduduk adalah US\$ 31.38 per penduduk.
- Pertanyaannya: kalau memang negara maju seperti Norway serius dan tulus dalam usaha mengurangi pemanasan global melalui pengurangan emisi karbon, mengapa mereka tidak mengurangi konsumsi energi mereka? Khususnya dari fossil fuel yang jelas2 non-renewable.
- Nilai tambah petroleum di Norway US\$ 20464/penduduk. Jauh di atas nilai tambah Sawit di Indonesia, baik per pekerja, apalagi per penduduk.

## Ironi Karbon Global

- Jika Norway mau mengurangi 1% saja nilai tambah dari ekstraksi oil and gas nya, nilai tambahnya sudah US\$ 205 per penduduk, atau 6.5 kali lipat nilai tambah sawit per penduduk Indonesia.
- Poin saya: pengurangan produksi (apalagi jika ditambah konsumsi energi) di Norway hanya sedikit mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan penduduk Norway, tapi cukup besar dampaknya terhadap emisi karbon.
- Pengurangan nilai tambah sawit di Indonesia akan besar sekali pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja sawit atau penduduk Indonesia.
- Jadi negara-negara maju sebenarnya mempunyai cara yang lebih efektif untuk mengurangi emisi daripada menekan produksi negara-negara seperti Indonesia

## Ironi Karbon Global

- Saya menangkap kesan negara2 maju seolah2 berkata kepada kita “Kalian kan miskin, tapi hutan kalian masih luas dan menjadi paru2 dunia. Jadi kalian jaga saja lingkungan hidup kalian, tidak usah menjadi kaya. Kurangi emisi karbon kalian. Nanti kami beri kalian uang lewat skema REDD+ dsb.
- Kami sudah terlanjur kaya. Hutan kami sudah terlanjur rusak. Sulit buat kami menurunkan standar hidup dengan mengurangi konsumsi. Jadi biarkan kami memproduksi, mengeksploitasi non-renewable resources, tetap kaya dan menjaga standar hidup kami dengan memboroskan energi. Nanti kami beri kalian uang”
- Jika paradigma seperti ini kita dukung, Indonesia tidak akan pernah bisa sejajar dengan mereka. Inilah ironi rejim karbon global saat ini.

## Teori Konspirasi?

- Membaca buku “A Game as Old as Empire” (Steven Hiatt, ed), The Shock Doctrine (Naomi Klein) dan Uranium (Tom Zoellner), membuat saya tidak bisa mengesampingkan Teori Konspirasi untuk memelihara kesejahteraan negara maju.
- Minyak sawit berpotensi jadi saingan oil and gas sebagai sumber energi. Tapi minyak sawit hanya ekonomis kalau rasio harganya dengan oil bagus. Dengan harga minyak < US 100/barrel, biofuel sawit tidak bisa bersaing dengan minyak.
- Jika produksi sawit semakin berlimpah, di luar kebutuhan pangan akan tersedia surplus produksi yang cukup besar untuk dikonversi menjadi biofuel. Pada titik tertentu, bukan tidak mungkin biofuel sawit bisa lebih murah dari oil. Negara yang tergantung minyak seperti Norway jelas dirugikan. Jika moratorium hutan efektif, ekspansi Sawit jadi terganggu. Makanya di Afrika pun ekspansi Sawit diganggu LSM global.

# Menilai komitmen Norwegia

- 26 Mei 2010 Lol ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim dan Menlu Indonesia Marty Natalegawa
- Dalam Lol tersebut, komitmen Norwegia dibuat dalam bahasa yang sangat longgar, yaitu **“has the intention to contribute funds”** atau **“mempunyai maksud berkontribusi dana”**. Bukan bahasa yang tegas **“will contribute funds”** apalagi **“is obliged to ...”**
- Jumlah dananya pun masih **“kira-kira”**, dengan kata-kata **“in the order of magnitude of one billion USD.**
- Itupun kurs nya dipatok **1 USD = 6 NOK (kurs 2008 USD = 7 NOK)**

# Menilai komitmen Norwegia

- **Komitmen lunak tersebut masih ditambah prakondisi:**
  - ◆ (i) pembentukan mekanisme keuangan yang disepakati kedua pihak (jadi kalau Norwegia tidak setuju, dia tidak terikat komitmen),
  - ◆ (ii) capaian (output) yang memadai (adequate deliverables) yang akan di-review oleh Kelompok Review Independen (jadi kinerja pemerintah Indonesia akan dinilai oleh kelompok independen. BPK, BPKP, DPR tidak dipercaya)
  - ◆ Detil dari terms and conditions untuk dukungan dana Norwegia akan dibuat dalam perjanjian antara Norwegia dengan fund manager (bukan dengan Indonesia)
  - ◆ Fund manager tsb haruslah lembaga keuangan ber-reputasi internasional (seolah-olah mereka tidak ada skandal, ingat skandal keuangan global), dan pengelolaannya melibatkan wakil dari pemerintah, pemda, masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan suku asli → Mekanisme keuangan yang jauh lebih ketat dari IMF, Bank Dunia dan sebagainya.

## Menilai komitmen Norwegia

- Itupun tanpa kejelasan berapa dana yang dikucurkan setiap tahunnya selama periode 2010-2016. Alokasi dana tahunan tergantung pada keputusan Parlemen Norwegia.
- Tahun 2008, penerimaan negara dalam APBN Norwegia adalah NOK 1433,7 milyar (USD 179,2 milyar). Ini APBN konsolidasi pemerintah pusat dan daerah. Jumlah transfer ke luar negeri (termasuk di dalamnya hibah LN) NOK 22,1 milyar (USD 2,76 milyar).
- Kalau diasumsikan semua transfer tersebut berupa hibah, komitmen Norwegia setara 36% transfer LN nya tahun 2008. Jika dirata-rata 2011-2016 (6 tahun), jatuhnya 6%. Padahal biasanya sebagian besar transfer adalah dalam bentuk pemberian pinjaman.



## Menilai komitmen Norwegia

- **Intinya: komitmen longgar Norwegia, dengan dana yang jumlahnya kira-kira, dan disertai persyaratan yang lebih berat dari IMF dan Bank Dunia itu, diperkirakan akan mengambil porsi yang lumayan besar dari total bantuan luar negeri Norwegia setiap tahun. Apalagi jumlah setiap tahunnya tidak jelas, masih menunggu alokasi dari Parlemen.**
- **Jadi, wajar untuk meragukan seberapa kuat dan kongkret komitmen Norwegia. Apalagi komitmennya hanya ditulis satu paragraf di halaman 4 saja.**
- **Kontras dengan komitmen Indonesia yang ditulis sebagai "kewajiban", dengan strong words seperti "preparatory steps ... Will be taken .." atau bahasa direktif seperti "identify, develop, implement", panjangnya sekitar 2 halaman.**

## **Bandungkan dengan pajak yang diperoleh**

- **Selama Januari-April 2010, nilai ekspor kertas dan barang dari kertas adalah USD 1.75 milyar. Untuk minyak sawit dan pengolahan sawit USD 3.88 milyar, sementara pengolahan kayu US\$ 1.53 milyar. Total USD 7.11 milyar.**
- **Dengan asumsi keuntungan 15% dan PPh badan 25%, setidaknya diperoleh PPh USD 267 juta selama 4 bulan. Kalau dihitung prorata, PPh dari ekspor ketiga kelompok tersebut diperkirakan USD 800 juta pada tahun 2010 saja.**
- **Itu belum termasuk PPh orang pribadi dari pemilik, manajemen dan karyawan, PPh badan dan PPN dari produk ketiga kelompok tersebut yang dijual di pasar domestik, PBB, restitusi PPN ekspor yang belum bisa ditarik perusahaan, PPN dari belanja rumah tangga pemilik**

## **Bandungkan dengan pajak yang diperoleh**

- Ketiga kelompok tersebut kinerjanya akan terpengaruh oleh implementasi Lol dengan Norwegia. PPh badan dari ekspor ketiganya (**hanya ekspor ya, belum penjualan domestik**) pada tahun 2010 saja diperkirakan tidak jauh di bawah komitmen Norwegia selama 2010-2016. Ini belum termasuk pajak-pajak lainnya.
- Intinya, penerimaan pajak dari ketiga kelompok tersebut selama 2010-2016 jauh lebih besar dari komitmen Norwegia (yang diragukan itu).
- Berapa potensi pajak yang hilang? Saya belum bisa menghitungnya karena hal ini sangat tergantung pada seberapa luas dan intensitas implementasi program Lol.
- Message-nya: hitung betul implementasi Lol dari semua sisi. Lihat juga grafik indeks industri.

# Sustainability

- ◆ **PRASYARAT LUNAK BAGI KELESTARIAN (WEAK CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY)**
  - ★ **MEMBOLEHKAN KONVERSI DAN EKSTRAKSI SUMBER DAYA ALAM MENJADI MODAL BUATAN MANUSIA (MAN-MADE CAPITAL)**
  - ★ **SYARAT 1: MEMENUHI KRITERIA SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS (SCBA) DAN KRITERIA LESTARI PRODUKSI, EKOLOGI DAN SOSIAL-EKONOMI**
  - ★ **SYARAT 2: TERDAPAT REINVESTASI DALAM JUMLAH YANG CUKUP DAN DISTRIBUSI YANG OPTIMAL UNTUK MENGGOMPENSASI EKSTERNALITAS NEGATIF SEPerti DEFORESTASI DLL**
  - ★ **SYARAT 3: MAN-MADE CAPITAL DAN HASILNYA DIJADIKAN SUMBER DANA UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA SUSTAINABILITY**
  - ★ **SYARAT 4: SDA MEMPUNYAI RESILIENSI TERHADAP GEJOLAK (SHOCKS) INTERNAL DAN EKSTERNAL**

# Sustainability

## ◆ PRASYARAT KERAS BAGI KELESTARIAN (STRONG CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY)

- ★ SECARA ABSOLUT TIDAK MEMBOLEHKAN KONVERSI DAN EKSTRAKSI SUMBER DAYA ALAM MENJADI MODAL BUATAN MANUSIA (MAN-MADE CAPITAL)
- ★ ALASAN 1: SDA SUDAH JAUH DI BAWAH TINGKAT LESTARI, BAHKAN MENDEKATI AMBANG BATAS KEPUNAHAN
- ★ ALASAN 2: TIDAK TERSEDIA SISTEM DAN MEKANISME YANG MEMADAI UNTUK MENJAMIN REINVESTASI DALAM JUMLAH YANG CUKUP DAN DISTRIBUSI YANG OPTIMAL
- ★ ALASAN 3: KEGAGALAN PEMANFAATAN MAN-MADE CAPITAL UNTUK MENJAMIN KELESTARIAN
- ★ ALASAN 4: SDA YANG ADA BERSIFAT MULTIFUNGSI (BIODIVERSITAS, DAERAH TANGKAPAN AIR DLL)

## Akankah moratorium efektif?

- Salah satu poin terpenting Lol adalah “A two year suspension on all new concessions for conversion of peat and natural forest”. Untuk mudahnya disebut moratorium.
- Masalahnya: apakah moratorium cenderung mengurangi atau memperparah deforestasi (kerusakan hutan)
- Lihat Wibowo, DH, Tisdell, C.A., and Byron, R.N (1997), “Deforestation and Capital Accumulation”, *Asia Pacific Journal on Environment and Development*, 4(1): 11-28. Also Wibowo (2010). “Deforestation and Farmers’ Capital Accumulation: A Case Study in the Kerinci-Seblat National Park, Indonesia”. *www.sdi.or.id*
- Lihat Wibowo (2010). “Deforestation Mechanism: An Economic Analysis Based on the Fokker-Planck Equation”, *www.sdi.or.id*

## Akankah moratorium efektif?

- Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Jambi, luas kira-kira 1,3-1,5 juta hektar. Di sisi Kerinci, TNKS terus-menerus dirambah masyarakat untuk dijadikan ladang kayu manis, kentang dan atau tanaman ladang lain seperti cabe.
- Pada awalnya, petani muda menjadi *anak ladang*, lalu surplus dari ladang ditanamkan kembali untuk membuka hutan lebih lanjut.
- Biasanya kemiskinan menjadi pendorong kerusakan hutan. Di TNKS, kemiskinan mencegah petani merusak hutan karena membuka ladang memerlukan modal. Tapi surplus dari ladang membuat mereka mampu mengakumulasi kapital untuk selanjutnya merambah hutan.
- TNKS tidak bisa digolongkan the Commons karena dia dikelola oleh Kemhut dan pemda.

## Akankah moratorium efektif?

- Namun karena keterbatasan dana, staff dan peralatan, dengan wilayah begitu luas, otoritas tersebut tidak mampu menahan laju perambahan hutan. Ingat, di antara anak ladang itu ada yang berpendidikan universitas.
- Jika moratorium berlaku nasional, maka seluruh hutan alam dan gambut di Indonesia menjadi “kuasi Taman Nasional” selama dua tahun.
- Di sisi lain, jumlah perambah potensial bisa naik. Dengan tidak adanya ekspansi HTI dan sawit, terdapat tambahan angkatan kerja di sekitar hutan yang tidak terserap> Seperti pengalaman TNKS, new job seekers ada yg masuk ke hutan.
- Jadi, bisa saja moratorium meningkatkan perambahan hutan.
- Apakah WWF berhasil mengurangi deforestasi di Teso Nilo???



# Penutup

TUHAN MENCIPTAKAN KITA  
SEBAGAI BANGSA RAJAWALI,  
TAPI KITA SENDIRI  
(TERUTAMA PEMIMPIN2 KITA)  
YANG MEMBUAT KITA  
MENJADI BANGSA BEBEK.  
MARI BANGKIT DAN TERBANG  
BEBAS PERKASA SEBAGAI  
RAJAWALI

dradjad wibowo, 20 Mei 2006